

Prioritas Alokasi Sumber Daya Fisik Di Daya Tarik Wisata Danau Paisupok, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Chiki Welly ^{a,1}, Ida Bagus Suryawan ^{a,2}, I Gede Gian Saputra ^{a,3}

¹ chiki.welly@student.unud.ac.id, ² idabagussuryawan@unud.ac.id, ³ igedegiansaputra@unud.ac.id.

^a Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jl. Sri Ratu Mahendradatta, Jimbaran, Badung, Bali 80361, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the priority of physical resource allocation at the Paisupok Lake Tourist Attraction, Banggai Kepulauan, Central Sulawesi. A quantitative approach was applied using the Analytical Hierarchy Process (AHP), supported by Expert Choice software. A total of 15 respondents comprising heads and staff of the Banggai Kepulauan Tourism Office were selected through purposive sampling based on specific criteria, including experience, capacity, and contextual understanding of tourism resource management. The findings reveal that Infrastructure holds the highest priority with a weight of 0.4601, followed by Sustainable Facilities (0.3859), Location Map (0.0851), and Legal Basis/Policy (0.0689). Infrastructure, such as road access, plays a critical role in improving accessibility, safety, and destination competitiveness. The use of AHP proved effective in identifying and prioritizing strategic needs based on measurable criteria. This research has important implications for evidence-based decision-making, tourism planning, and efficient resource allocation. AHP provides a clear framework for both short- and long-term development plans, ensuring resources budget, labor, time are allocated to the most impactful areas. Long-term, the findings support the environmental, social, and economic sustainability of Paisupok Lake. Furthermore, this method can be replicated in other tourist destinations with similar characteristics, contributing to more integrated and participatory tourism management policies at the regional level.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Paisupok Lake, Resource Allocation, Infrastructure, Tourist Attraction

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, didasarkan pada rencana induk nasional yang menuntut alokasi sumber daya yang efektif, meliputi infrastruktur sebagai fondasi fisik, sumber daya manusia, dan teknologi. Perencanaan alokasi sumber daya yang tepat merupakan kunci utama pengembangan destinasi, khususnya ketika sumber daya terbatas dan permintaan wisata meningkat, seperti yang ditegaskan (Kuncoro dalam Bambang, 2017) dan juga prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan dalam UU No. 10 Tahun 2009. Namun, masalah umum yang sering terjadi di berbagai daya tarik wisata Indonesia adalah kurangnya perencanaan dan prioritas yang jelas (Setiawan, 2016), berujung pada misalokasi sumber daya yang menghambat kualitas pengalaman wisatawan dan kontribusi ekonomi daerah. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana banyak tempat wisata, termasuk Danau Paisupok yang merupakan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) berdasarkan SK Bupati No. 165 Tahun 2019, masih kekurangan fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian mengenai alokasi sumber daya dalam pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan, seperti yang diungkapkan Inskeep (1991, dalam Daudji, 2021) yang menekankan perlunya alokasi sumber daya secara efektif dan efisien untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Studi

penelitian sebelumnya sering menyoroti pentingnya perencanaan strategis dalam pariwisata. Namun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan metodologi yang secara objektif mengidentifikasi prioritas alokasi sumber daya fisik. Laporan lapangan seperti oleh Lomboki (2023) telah mengindikasikan bahwa masalah aksesibilitas menjadi hambatan signifikan pada Danau Paisupok, namun belum secara sistematis menawarkan solusi prioritas berbasis kebutuhan.

Secara ideal (*das sollen*), alokasi sumber daya fisik di Danau Paisupok seharusnya didasarkan pada analisis prioritas yang komprehensif, mengutamakan aspek fundamental seperti aksesibilitas yang mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan wisatawan (Middleton et al., 2009). Namun, realitanya (*das sein*) menunjukkan bahwa kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di wilayah ini cenderung belum mempertimbangkan urgensi kebutuhan secara objektif dan sistematis. Alokasi dana justru lebih banyak diarahkan pada fasilitas sekunder seperti *diving centre* atau toilet (Dinas Pariwisata Bangkep, 2024), sementara kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan menuju Danau Paisupok masih belum memadai dan menjadi hambatan utama (Lomboki, 2023).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum adanya kerangka kerja jelas dalam menetapkan prioritas telah mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan berpotensi pemberoran

anggaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk secara sistematis mengidentifikasi dan merumuskan prioritas alokasi sumber daya fisik yang objektif dan rasional, mengatasi inkonsistensi kebijakan sebelumnya, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi keberlanjutan, yang belum ditemukan dalam studi-studi sebelumnya untuk konteks Danau Paisupok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan kerangka pemikiran kuantitatif untuk menetapkan prioritas alokasi sumber daya fisik di Daya Tarik Wisata Danau Paisupok, yang berlokasi di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih mengingat statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) yang menunjukkan potensi tinggi namun masih menghadapi tantangan dalam hal sarana dan prasarana. Pengumpulan data primer dilakukan pada periode peralihan tahun, tepatnya sejak akhir bulan Desember 2024 hingga awal Januari 2025. Pemilihan rentang waktu ini bersifat strategis, mengingat Danau Paisupok biasanya mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, terutama pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Lingkup bahasan penelitian ini mencakup dua aspek utama: analisis kondisi eksisting Daya Tarik Wisata Danau Paisupok berdasarkan konsep komponen produk pariwisata (atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ansilieritas), serta penentuan prioritas alokasi sumber daya fisik melalui tahapan pengambilan keputusan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data pada kurun waktu tertentu di tahun 2024, melibatkan observasi lapangan, survei, dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengamati karakteristik dan kriteria pendukung alokasi sumber daya, serta survei menggunakan kuesioner tertutup yang dirancang secara sistematis untuk mendapatkan pandangan responden terkait bobot keputusan dalam penilaian tingkat kepentingan setiap kriteria dan alternatif. Kuesioner ini secara khusus mengadopsi skala perbandingan berpasangan (1-9) yang sesuai dengan metode AHP, memudahkan kuantifikasi data dan analisis statistik. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, meliputi gambar kondisi eksisting, indikator kriteria utama, dan peta Danau Paisupok, serta studi literatur dari sumber relevan.

Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana responden dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh Pegawai Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 23 orang berdasarkan data BPS 2015. Sebanyak 15 responden dipilih, terdiri dari kepala dan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, pengelola wisata Danau Paisupok, serta wisatawan (lokal, domestik, dan mancanegara) yang memahami konteks pariwisata, pembangunan, dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemilihan 15 responden ini didasarkan pada prinsip AHP yang mengutamakan kualitas ahli daripada kuantitas, memastikan responden memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk memberikan penilaian yang valid dan akurat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang merupakan teknik pengambilan keputusan komprehensif untuk menangani berbagai tujuan dan kriteria berbasis perbandingan preferensi dari masing-masing faktor dan struktur hirarkinya. Proses analisis AHP ini mengikuti tiga tahap utama sesuai konsep Herbert A. Simon (1960) yang diintegrasikan dengan metodologi Saaty (1980): Tahap *Intelligent* melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi relevan, serta penentuan tujuan, kriteria, dan subkriteria. Tahap *Modelling* mencakup penyusunan struktur hirarki, pembuatan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar elemen, serta perhitungan bobot prioritas menggunakan matriks perbandingan. Terakhir, Tahap *Choice* dilakukan dengan meninjau hasil perhitungan konsistensi dan prioritas, lalu memilih alternatif terbaik berdasarkan bobot tertinggi. Seluruh proses ini bertujuan untuk merumuskan dasar pengambilan keputusan yang rasional dan berorientasi pada keberlanjutan alokasi sumber daya fisik di Danau Paisupok.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Eksisting

Danau Paisupok, yang berlokasi di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, adalah danau alami yang terkenal dengan keindahan air tiga warna dan kejernihannya, hingga dijuluki "Danau Cermin". Popularitasnya yang meningkat di kalangan wisatawan mancanegara menunjukkan tingginya permintaan kunjungan. Pada tahun 2023, Danau Paisupok tercatat sebagai daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi di Banggai Kepulauan, dengan total 49.696 kunjungan, jauh melampaui destinasi lain seperti Pantai Poganda (31.565 kunjungan) dan Paisu Batango (15.580 kunjungan). Selanjutnya, berdasarkan data dari Bidang Pemasaran melalui Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW). Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 20.555 orang. Ini mencerminkan titik awal pemulihannya pasca pandemi yang mungkin masih berdampak pada minat kunjungan. Tahun 2023, terjadi lonjakan hampir 2,5 kali lipat menjadi

49.696 pengunjung, yang mengindikasikan adanya peningkatan popularitas destinasi, efektivitas promosi, atau perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas wisata.

**Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan
Danau Paisupok**

Tahun	Alternatif
2022	20,555
2023	49,696
2024	53,293

Tahun 2024, berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengunjung mencapai 53.293 orang, menunjukkan tren kenaikan yang berkelanjutan, meskipun tidak setinggi lonjakan tahun sebelumnya (Tabel 1). Namun, peningkatan jumlah kunjungan ini juga menuntut perhatian serius terhadap alokasi sumber daya fisik yang ada. Infrastruktur yang ada, seperti jalan, fasilitas parkir, dan area wisata, perlu dipersiapkan untuk mendukung lonjakan pengunjung yang pesat (Setiawan, 2021). Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan dampak besar terhadap kapasitas infrastruktur yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perencanaan yang matang agar alokasi sumber daya fisik tidak salah arah dan menghindari misalokasi (Asmara, 2020).

Misalokasi sumber daya dapat terjadi jika infrastruktur dan fasilitas yang ada tidak cukup memadai untuk mendukung volume kunjungan yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pengalaman wisatawan dan menurunkan daya tarik wisata Danau Paisupok. Proses pengembangan daya tarik wisata ini harus mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang ada (Triyono, 2018). Setiap keputusan perencanaan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata ini (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2022). Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan ini juga mempengaruhi proses perencanaan dalam pengembangan lebih lanjut. Pemerintah dan pihak pengelola perlu merencanakan pengembangan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah fasilitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan (Setiawan, 2021). Sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan bijak, agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang dapat merusak daya tarik utama dari Danau Paisupok. Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya fisik, baik dalam hal pembangunan fasilitas baru maupun perawatan yang ada, harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah disepakati dalam perencanaan wisata berkelanjutan (Asmara, 2020; Triyono, 2018).

Jika dilihat dari *Tourism Area Life Cycle (TALC)* Daya Tarik Wisata Danau Paisupok masuk pada tahap *development*. Merujuk pada data kunjungan wisatawan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Danau Paisupok menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20.555 kunjungan, meningkat drastis menjadi 49.696 pada tahun 2023, dan mencapai 51.669 pengunjung hanya dalam sembilan bulan pertama tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa Danau Paisupok telah melewati tahap eksplorasi dan keterlibatan, dan kini berada pada fase pengembangan.

Indikator lain yang mendukung identifikasi fase pengembangan adalah meningkatnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi, seperti pengembangan fasilitas umum sebagai contoh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah meninjau proyek pembangunan jalan dan menyerahkan bantuan perahu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sekitar Danau Paisupok, menunjukkan keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengembangan fasilitas wisata, selain itu peningkatan promosi wisata secara digital sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menjalin kerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dan Radio Republik Indonesia (RI) untuk mempromosikan potensi wisata daerah, termasuk Danau Paisupok. Danau Paisupok menunjukkan indikasi kuat memasuki fase *development*, salah satunya melalui viralitas konten destinasi tersebut di berbagai platform digital. Konten mengenai Danau Paisupok telah memperoleh perhatian luas di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Misalnya, video yang dibagikan oleh akun TikTok @victorien.munch pada 7 Mei 2024, menampilkan pemandangan Danau 63 Paisupok secara sinematik dan telah memperoleh lebih dari 304.000 suka dan hampir 2.000 komentar, menunjukkan respons yang sangat positif dari pengguna platform tersebut (TikTok, 2024).

Selain itu, akun Instagram @mickwagey mengunggah foto dan video eksplorasi Danau Paisupok yang mendapatkan lebih dari 39.000 suka, menambah visibilitas destinasi ini di platform visual seperti Instagram (Instagram, 2024). Viralitas ini berkontribusi terhadap peningkatan eksposur digital destinasi, yang tidak hanya mendorong user-generated content tetapi juga memperkuat brand image Danau Paisupok sebagai daya tarik wisata alam. Tingginya jumlah interaksi pada konten tersebut menunjukkan bahwa destinasi ini mulai dikenali secara luas oleh masyarakat digital, termasuk potensi wisatawan dari luar daerah. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik fase *development* menurut Butler (1980), di mana destinasi mulai dikenal luas dan menarik perhatian pihak luar. Selain itu, Bupati Banggai Kepulauan merencanakan Festival Internasional Pesona Danau

Paisupok pada November 2025, sebagai upaya promosi bertaraf internasional dan kolaborasi antar kabupaten di Sulawesi Tengah.

Indikator fase *development* yang tercermin dalam rencana festival internasional di Danau Paisupok yaitu rencana festival ini mencerminkan strategi promosi masif yang tidak hanya menyasar wisatawan lokal atau domestik, tetapi juga internasional. Ini merupakan karakteristik utama fase *development* dalam TALC, dimana strategi pemasaran dikembangkan untuk menarik pasar yang lebih luas dan tersegmentasi. Kolaborasi antar kabupaten di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya koordinasi lintas wilayah dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat sesuatu yang 64 belum terlihat pada fase awal (*exploration and involvement*) dan pemerintah menjadi aktor utama dalam pembangunan destinasi. Festival ini berpotensi menarik investasi untuk fasilitas pendukung seperti penginapan, akses jalan dan layanan publik lainnya semua merupakan bagian dari pola pertumbuhan fasilitas fisik pada fase *development*. Dampaknya tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap multiplier effect ekonomi daerah.



Gambar 1 Aktivitas Wisatawan Menggunakan Stand Up Paddle

Sumber: Peneliti, 2024

Danau Paisupok memiliki dua jenis atraksi wisata yang menjadi daya tarik di mata wisatawan. Jenis atraksi yang ditawarkan meliputi atraksi alam dan aktivitas wisatawan seperti snorkeling, berperahu dan berenang. Hasil pengamatan di lapangan atraksi alam dapat dilihat dari kejernihan airnya yang masih sangat terjaga keasliannya. Sehingga danau ini disebut dengan "Danau Cermin". Wisatawan yang duduk diatas perahu dapat dengan jelas mengamati kejernihan air yang menampilkan batang kayu dan tumbuhan dasar laut, terumbu karang, ikan-ikan tropis di dalam Danau Paisupok. Wisatawan yang berada di atas perahu dapat dengan jelas mengamati formasi batang kayu dan vegetasi dasar danau,

terumbu karang, serta ikan-ikan tropis yang hidup di dalamnya.

Keunikan lain dari Danau Paisupok adalah variasi warna airnya yang khas hijau, biru, dan hitam yang membedakannya dari danau lain. Perpaduan warna ini muncul dari pantulan tanaman rumput laut di dasar danau yang menciptakan efek biru kehitaman, serta pantulan vegetasi alami yang tumbuh subur di sekelilingnya yang menghasilkan nuansa hijau. Warna hitam yang dominan pada sebagian area danau terinspirasi dari nama lokal "Paisu" (laut) dan "Pok" (hitam atau gelap), merefleksikan perpaduan alam yang unik dan memberikan kesan misterius bagi pengunjung. Selain itu, Danau Paisupok juga merupakan habitat kaya keanekaragaman hayati, mendukung berbagai spesies flora akuatik dan fauna penting, termasuk burung maleo, rangkong, dan elang, yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem setempat. Kedalaman danau juga menyimpan formasi batang pohon mati berusia ratusan tahun (Gambar 1), menciptakan lanskap bawah air yang misterius, historis, dan bernilai ekologis.

Aspek aksesibilitas menuju Danau Paisupok, yang terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat dicapai melalui berbagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama seperti Luwuk dan Salakan. Perjalanan umumnya dimulai dengan penerbangan menuju Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai, seringkali dengan transit di Makassar. Meskipun telah ada upaya konektivitas, kondisi infrastruktur jalan dari titik utama menuju lokasi danau masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan wisatawan. Terkait biaya akses, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, dengan biaya parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Struktur biaya ini dinilai relatif terjangkau bagi wisatawan dari berbagai kalangan, mendukung aksesibilitas tanpa mengurangi kualitas pengalaman berwisata di Danau Paisupok.

Amenitas yang tersedia di sekitar Danau Paisupok memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan dan kenyamanan wisatawan. Dukungan masyarakat setempat juga esensial dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlanjutan. Salah satu jenis akomodasi yang ditawarkan adalah kamar berukuran 3x4 meter yang didesain fungsional untuk satu hingga dua orang, dilengkapi tempat tidur, kipas angin, serta perlengkapan mandi dasar. Fasilitas perahu dayung tersedia dengan biaya sewa Rp30.000 per unit, memungkinkan eksplorasi danau lebih luas dan memperkaya pengalaman wisatawan secara interaktif. Keberadaan *stand up paddle* juga mendukung konsep *experiential tourism* dan tergolong *low-impact tourism*, tidak menimbulkan polusi atau gangguan ekosistem perairan, serta mendorong pemanfaatan ruang air secara produktif

tanpa infrastruktur berat. Selain itu, terdapat 8 unit gazebo yang tersebar di sekitar danau sebagai tempat istirahat, serta ruang jaga yang penting untuk keamanan dan informasi bagi pengunjung, mencerminkan salah satu aspek Saptu Pesona. Layanan penyewaan alat snorkeling seharga Rp30.000 per set juga tersedia untuk meningkatkan pengalaman berinteraksi dengan keindahan bawah air danau.

Selain itu, pengelola juga menyediakan layanan sewa drone dengan tarif Rp500.000 per baterai. Penetapan tarif ini mempertimbangkan risiko kerusakan dan potensi kehilangan perangkat teknologi yang bernilai tinggi. Penggunaan drone di area terbuka seperti Danau Paisupok menawarkan sudut pandang visual yang spektakuler, memungkinkan pengunjung merekam lanskap danau dari ketinggian dengan hasil yang lebih dramatis dan estetik. Namun, untuk menjaga keberlangsungan fasilitas dan menghindari kerugian besar akibat potensi kerusakan alat, tarif sewa drone ditetapkan lebih tinggi dibandingkan fasilitas rekreasi lainnya. Layanan ini merefleksikan upaya pengelola dalam menghadirkan pengalaman wisata yang lebih modern dan beragam, sekaligus menunjukkan adaptasi terhadap tren pariwisata digital.

Ketersediaan fasilitas pendukung di Danau Paisupok juga mencakup ruang ganti yang berdekatan dengan pos tiket. Fasilitas ini dalam kondisi layak pakai, bersih, dan cukup nyaman untuk digunakan wisatawan setelah beraktivitas air seperti berenang atau snorkeling. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan terkait lokasi fasilitas tersebut. Jarak antara ruang ganti dengan area utama danau tergolong cukup jauh, mengharuskan pengunjung berjalan menaiki jalan setapak menuju area yang lebih tinggi. Kondisi topografi ini dapat menjadi hambatan, terutama bagi wisatawan lansia, anak-anak, atau mereka yang membawa perlengkapan berat seperti pelampung atau alat snorkeling. Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan amanitas, pemerintah daerah mulai pembangunan dan revitalisasi beberapa fasilitas penunjang wisata di sekitar Danau Paisupok pada tahun 2024, sebagai bagian dari sub-kegiatan "Pengadaan Pemeliharaan" dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU). Inisiatif ini mencakup pembangunan mushola yang berfungsi strategis dalam menyediakan ruang ibadah yang nyaman bagi wisatawan muslim tanpa mengganggu pengalaman menikmati alam, didesain selaras dengan lingkungan sekitar. Selain itu, diving centre juga dibangun untuk mendukung aktivitas selam yang semakin diminati, berfungsi sebagai pusat informasi, penyewaan alat, pelatihan dasar, dan registrasi. Fasilitas toilet juga mengalami revitalisasi dengan desain yang lebih fungsional dan penampilan yang bersih serta ramah lingkungan.

Dalam aspek ansilieritas dan kontribusi ekonomi lokal, Danau Paisupok yang dikelola oleh

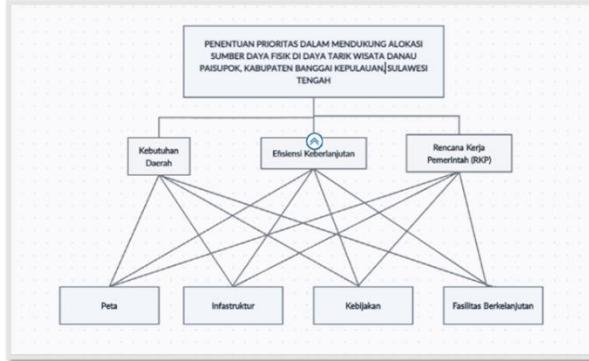
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran krusial dalam perekonomian desa setempat. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), destinasi wisata ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi lokal. Sistem pembagian pendapatan yang diterapkan mengalokasikan sekitar 40% dari pendapatan pariwisata untuk meningkatkan PAD desa, memungkinkan pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat. Selanjutnya, sekitar 40% dari pendapatan dialokasikan kepada pemilik lahan, yang berperan penting dalam menyediakan area untuk pengembangan destinasi wisata. Pembagian ini esensial untuk menjaga hubungan positif antara pengelola dan masyarakat lokal, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berkontribusi dalam penyediaan lahan. Sementara itu, pengelola destinasi wisata memperoleh 20% dari pendapatan yang diperoleh untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

3.2 Hasil Penentuan Prioritas

Tahap *intelligent* adalah mengumpulkan serta menyusun kriteria pemilihan. Dalam kasus ini penentuan kriteria dan alternatif untuk pencarian pengukuran dalam mengalokasikan sumber daya fisik yang tepat berdasarkan tingkat prioritasnya dengan menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan perbandingan kepada responden. Kriteria utama yang perlu dipertimbangkan dalam alokasi sumber daya fisik meliputi kebutuhan daerah, efisiensi keberlanjutan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam pendekatan partisipatif perencanaan daerah harus berdasarkan kebutuhan nyata yang muncul dari masyarakat dan kondisi geografis suatu wilayah (LPKN, 2022). Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, setiap kebijakan dan alokasi fisik perlu dirancang agar tidak hanya efisien dalam pelaksanaan, tetapi juga tidak merusak fungsi ekologis yang ada (Yusfi, 2021).

Efisiensi sumber daya dan keberlanjutan menjadi dua sisi mata uang dalam memastikan pembangunan tidak bersifat temporer atau merugikan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, RKP dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional. Dengan mengacu pada RKP, alokasi sumber daya fisik di Danau Paisupok akan terintegrasi dengan arah pembangunan nasional, memastikan keselarasan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan serta lebih mudah mendapatkan realisasi pendanaan dan dukungan dari pemerintah pusat. Sedangkan, alternatif merupakan opsi atau pilihan yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan akan dilakukan proses perbandingan berpasangan. Alternatif ini adalah keputusan yang

dipertimbangkan dalam menentukan prioritas. Alternatif dalam penelitian ini diambil dari Konsep Pengembangan Wisata Danau oleh Gumilar Sastryayuda (2010) yang menjadi modal dasar kriteria fisik pengembangan danau sebagai daya tarik wisata.



Gambar 2 Bagan AHP

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Pada tahap *modelling* (Gambar 2), penulis memilih model pendekatannya adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam Hierarchy keputusan ini yang akan dibahas, kriteria dan alternatif.

Selanjutnya tahap *choice* merupakan sintesis akhir dari seluruh perhitungan AHP, di mana perbandingan bobot kriteria dan alternatif dievaluasi untuk menghasilkan prioritas global. Proses ini dilakukan menggunakan aplikasi *Expert Choice 2011*, dimulai dengan penilaian komparatif berpasangan (*pairwise comparison*) untuk setiap kriteria dan alternatif. Bobot setiap faktor (obyektif/kriteria, sub-obyektif, dan alternatif keputusan) ditentukan melalui perbandingan sepasang-sepasang elemen terhadap suatu kriteria yang ditetapkan, sering disebut sebagai proses assessment dalam *Expert Choice*. Analisis perbandingan kriteria utama menunjukkan dominasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam pengambilan keputusan.



Gambar 3 Bobot Tabel Kriteria

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Sebagaimana disajikan pada Gambar 3, RKP memiliki bobot 62,8%, menjadi pertimbangan utama bagi responden. Ini mengindikasikan bahwa kesesuaian pengembangan Danau Paisupok dengan arah kebijakan dan program pemerintah dinilai sebagai aspek paling menentukan. Kebutuhan Daerah menempati posisi kedua dengan bobot 22,7%, mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan lokal serta potensi dan permasalahan spesifik wilayah masih dianggap cukup penting, meskipun tidak sebesar dominasi RKP. Sementara itu, Efisiensi

Keberlanjutan memperoleh bobot terendah, yakni 14,5%, yang menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya belum menjadi fokus utama responden dalam konteks pengembangan wisata Danau Paisupok. Temuan ini menggambarkan bahwa perencanaan berbasis kebijakan pemerintah lebih diutamakan dibandingkan pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan atau kebutuhan lokal secara mendalam.

Dalam konteks daerah, RKP ini nantinya diadaptasi menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan formal bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan tahunan yang responsif, partisipatif, dan terukur. Penyesuaian ini penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pusat dan daerah, serta menjamin integrasi kebijakan yang mendukung pembangunan yang lebih efektif dan adaptif terhadap konteks lokal. Verifikasi konsistensi penilaian merupakan langkah krusial dalam tahap choice. Hasil perbandingan berpasangan yang diberikan oleh para responden ahli dalam proses penilaian menggunakan metode AHP memiliki nilai rasio inkonsistensi (*inconsistency ratio*) yang selalu lebih kecil dari 0,1, yaitu batas maksimum yang dapat diterima untuk menunjukkan konsistensi logis dalam pengambilan keputusan.



Gambar 4 Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Kebutuhan Daerah

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Gambar 4 menunjukkan bahwa alokasi sumber daya fisik yang dipilih oleh responden berdasarkan kriteria kebutuhan daerah adalah penetapan infrastruktur menempati posisi pertama, posisi kedua adalah fasilitas berkelanjutan, pilihan ketiga adalah peta lokasi dan pilihan terakhir adalah penentuan dasar hukum/kebijakan.



Gambar 5 Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Efisiensi Keberlanjutan

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Gambar 5 serupa dengan kriteria sebelumnya namun nilai bobotnya yang berbeda. Alokasi sumber daya fisik yang dipilih oleh responden berdasarkan kriteria efisiensi keberlanjutan adalah penetapan infrastruktur

menempati posisi pertama, posisi kedua adalah fasilitas berkelanjutan, pilihan ketiga adalah peta lokasi dan pilihan terakhir adalah penentuan dasar hukum/kebijakan.



Gambar 6 Bobot Alternatif Berdasarkan Kriteria Rencana Kerja Pemerintah

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Gambar 6 menunjukkan hasil yang serupa dengan kriteria sebelumnya, namun dengan perbedaan pada nilai bobot yang diperoleh masing-masing alternatif. Perhitungan bobot global untuk setiap alternatif dilakukan dengan mengaplikasikan rumus umum AHP: Prioritas Global Alternatif = Σ (Bobot Lokal Alternatif \times Bobot Global Kriteria).

Tabel 2 Consistency Ratio

Nilai CR	Matrik Perbandingan Elemen
0,00005	Perbandingan berpasangan tingkat kepentingan antar kriteria
0,03	Perbandingan berpasangan tingkat kepentingan antar sub kriteria pada kriteria kebutuhan daerah
0,00278	Perbandingan berpasangan tingkat kepentingan antar alternatif pada kriteria efisiensi keberlanjutan
0,01	Perbandingan berpasangan tingkat kepentingan antar alternatif pada kriteria Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

(Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan oleh para responden ahli dalam proses penilaian menggunakan metode AHP memiliki nilai rasio inkonsistensi (*inconsistency ratio*) yang lebih kecil dari 0,1, yaitu batas maksimum yang dapat diterima untuk menunjukkan konsistensi logis dalam pengambilan keputusan. Nilai rasio inkonsistensi yang rendah ini mengindikasikan bahwa para responden memberikan jawaban yang relatif stabil dan tidak bertentangan dalam membandingkan antar elemen berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

Tabel 3 Perhitungan Data

Alternatif	Perhitungan	Bobot
Peta Lokasi	$(0.109 \times 0.145) + (0.081 \times 0.227) + (0.081 \times 0.628) = 0.015805 +$	0.0851

Peta Lokasi	$(0.109 \times 0.145) + (0.081 \times 0.227) + (0.081 \times 0.628) = 0.015805 +$	0.050868
Infrastruktur	$(0.463 \times 0.227) + (0.453 \times 0.628) = 0.07047 +$	0.4601
Fasilitas Berkelanjutan	$0.105101 + 0.284484$	
Dasar Hukum	$(0.052 \times 0.145) + (0.074 \times 0.227) + (0.071 \times 0.628) = 0.00754 +$	0.0689
	$0.016798 + 0.044588$	
Fasilitas Berkelanjutan	$(0.353 \times 0.145) + (0.381 \times 0.227) + (0.395 \times 0.628) = 0.051185 +$	0.3859
	$0.086487 + 0.24826$	

(Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025)

Proses perhitungan dalam AHP dilakukan dengan mengalikan bobot lokal dari setiap alternatif terhadap kriteria tertentu dengan bobot global dari masing-masing kriteria tersebut. Nilai ini mencerminkan kontribusi kumulatif alternatif terhadap keseluruhan tujuan berdasarkan bobot relatif yang diberikan oleh para ahli untuk setiap kriteria. Nilai bobot lokal diperoleh dari hasil penilaian pakar terhadap alternatif-alternatif dalam satu kriteria tertentu, sedangkan bobot global kriteria menggambarkan pentingnya masing-masing kriteria terhadap tujuan utama pengambilan keputusan.

Tabel 4 Pengurutan Berdasarkan Prioritas

Bobot	Alternatif
0.4601	Infrastruktur
0.3859	Fasilitas Berkelanjutan
0.0851	Peta Lokasi
0.0689	Dasar Hukum/Kebijakan

(Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025)

Salah satu metode dalam menetapkan prioritas dengan mempergunakan hirarki. Prioritas dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, antara lain *high priority*, *intermediate priority* dan *low priority*. Dalam pengelompokannya, penetapan infrastruktur masuk dalam kategori *global priority* dengan total bobot 0.4601 atau 46,01% (Tabel 4) karena merupakan elemen fundamental yang akan mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Danau Paisupok. Infrastruktur mencakup pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya yang menjadi tulang punggung bagi pengembangan ekonomi dan aksesibilitas daerah.

Di lapangan, banyak kawasan wisata yang mengalami kesulitan dalam berkembang hanya karena kurangnya infrastruktur dasar. Sebagai contoh, tanpa akses jalan yang memadai, wisatawan sulit mencapai Danau Paisupok, yang tentunya akan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penetapan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mendukung perkembangan Danau Paisupok dan membuka peluang bagi sektor lainnya untuk berkembang. Hal ini didukung oleh literatur yang menunjukkan bahwa infrastruktur adalah faktor penentu dalam pengembangan kawasan wisata (Sohn, 2003). Kondisi jalan yang masih berbatu-batu dan tidak sepenuhnya beraspal, tentu menambah tantangan tersendiri, baik dari segi kenyamanan maupun keamanan perjalanan. Pentingnya pengaspalan jalan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan ini tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi juga untuk mengurangi potensi risiko kecelakaan. Jalan yang berbatu dan tidak rata meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Dalam hal ini, pengaspalan jalan dapat memperbaiki kondisi jalan dengan memberikan permukaan yang lebih rata, mengurangi gesekan, dan meningkatkan stabilitas kendaraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Dalam konteks pengembangan kawasan wisata danau, konsep kriteria fisik yang dikemukakan oleh Gumelar Sastryuda (2010) menjadi acuan utama dalam menetapkan langkah-langkah strategis pembangunan. Sastryuda menekankan bahwa keberhasilan suatu kawasan wisata tidak hanya bergantung pada potensi daya tarik alamnya, tetapi juga pada sejauh mana infrastruktur fisik mendukung operasionalisasi dan aksesibilitas kawasan tersebut. Kriteria fisik yang dimaksud meliputi penyediaan sarana-prasarana dasar seperti akses jalan yang memadai, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, layanan telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan.

Seluruh elemen ini menjadi fondasi penting agar kawasan wisata dapat berfungsi secara optimal, aman, dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Salah satu aspek yang paling krusial dalam kriteria tersebut adalah penetapan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan menuju kawasan wisata danau. Panjang dan lebar jalan, kualitas permukaan, serta kelengkapan fasilitas pendukung seperti penerangan dan rambu jalan perlu dirinci secara teknis dan diprioritaskan dalam rencana pembangunan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan mobilitas wisatawan, tetapi juga menyangkut efisiensi distribusi logistik, kecepatan respon dalam keadaan darurat, dan keterhubungan antar-wilayah. Tingginya bobot pada infrastruktur mencerminkan konsensus yang kuat dari para

responden bahwa aspek ini merupakan fondasi utama yang tidak dapat ditunda dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan kawasan wisata Danau Paisupok. Lebih lanjut, pentingnya pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang dari segi peningkatan akses fisik, melainkan juga dari perspektif keberlanjutan. Peningkatan infrastruktur secara terencana dan berkelanjutan mampu memperkuat daya saing kawasan melalui peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, dan daya tarik investor.

Dalam jangka panjang, keberadaan infrastruktur yang memadai akan memperkuat integrasi antar dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni dimensi ekologis (melalui pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas wisata), dimensi sosial (melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan akses terhadap layanan dasar), serta dimensi ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata).

Dengan demikian, penetapan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pengembangan Danau Paisupok bukanlah keputusan yang bersifat spekulatif atau subjektif, melainkan hasil dari proses analisis sistematis dan rasional berdasarkan data empirik dan teoritik. Pendekatan AHP memungkinkan proses pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan destinasi wisata secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Penelitian oleh Easterling et al. (2016) menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi yang aman dan efisien memiliki dampak langsung terhadap mobilitas wisatawan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Pengembangan jalan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merusak karakter alam dan estetika kawasan wisata. Seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan, penting untuk tetap menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar agar kualitas alam tetap terjaga. Holden (2016) dalam bukunya mengenai pariwisata berkelanjutan menyarankan bahwa pengembangan infrastruktur di kawasan wisata harus selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan, agar tidak merusak ekosistem yang ada. Fasilitas keberlanjutan menjadi prioritas kedua dalam kategori *Intermediate Priority* dengan total bobot 0.3859 atau 38,59% (Tabel 4).

Fasilitas ini mencakup pembangunan dan pengelolaan fasilitas yang mendukung pariwisata yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penyediaan energi terbarukan, dan fasilitas yang meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Di Danau Paisupok, keberlanjutan sangat penting untuk menjaga daya tarik alami kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa fasilitas

keberlanjutan, kawasan ini bisa menghadapi kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas keberlanjutan akan mendukung tidak hanya kenyamanan wisatawan, tetapi juga keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang. Penelitian oleh Gössling et al. (2009) menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata untuk memastikan kelangsungan sektor tersebut dan melindungi lingkungan.

Peta lokasi dan penentuan dasar hukum kebijakan menempati urutan terakhir dalam kategori *Low Priority*, meskipun keduanya tetap memiliki peranan penting. Peta lokasi membantu dalam perencanaan ruang dan penggunaan lahan yang lebih terarah, namun baru efektif diterapkan setelah infrastruktur dasar dan fasilitas keberlanjutan terbangun. Di Danau Paisupok, peta lokasi akan memastikan bahwa pengembangan dilakukan dengan tepat di area yang memiliki potensi terbaik untuk pariwisata, tanpa merusak lingkungan atau ekosistem. Namun, meskipun ini sangat penting, penerapan peta lokasi seharusnya dilakukan setelah aspek-aspek dasar yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, sudah terpenuhi. Artinya, peta lokasi baru akan efektif jika tersedia jaringan infrastruktur yang memadai, sehingga data dan rencana yang dituangkan dalam peta benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Selain itu, penentuan dasar hukum dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan akan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, meskipun tidak menjadi prioritas utama dalam tahap awal. Hukum dan kebijakan memang vital untuk legitimasi dan kelancaran proyek, tetapi implementasi dasar hukum kebijakan baru bisa efektif jika infrastruktur dan fasilitas keberlanjutan sudah berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik dari segi pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan pariwisata, efisiensi pengalokasian dan keberlanjutan daya tarik wisata. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek-aspek strategis dalam pengelolaan Danau Paisupok. Dengan hasil ini, pengambil kebijakan (Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, dan *stakeholder* lainnya) didorong untuk tidak lagi mengambil keputusan secara sektoral atau reaktif, melainkan berdasarkan prioritas yang objektif dan terukur. Penentuan prioritas alokasi sumber daya melalui AHP memberikan arah yang jelas dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan mengetahui lokasi prioritas maka rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang bisa disusun lebih tepat sasaran. Karena sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) bersifat terbatas, maka hasil penelitian ini membantu *stakeholder* mengalokasikan sumber daya secara

efisien ke aspek yang paling penting terlebih dahulu. Hal ini mendukung pengelolaan Danau Paisupok secara lebih efektif dan mengurangi pemborosan anggaran untuk aspek yang kurang prioritas.

Implikasi jangka panjangnya adalah pada keberlanjutan daya tarik wisata Danau Paisupok. Dengan pengelolaan berbasis prioritas strategis, maka keberlanjutan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan tersebut dapat lebih terjaga. Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat direplikasi pada daya tarik wisata lainnya, baik di wilayah Banggai Kepulauan maupun daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi pengambilan keputusan di sektor pariwisata secara umum.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Danau Paisupok memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam yang berdaya saing dan berkelanjutan. Potensi tersebut tercermin dari kekayaan atraksi visual, aksesibilitas yang cukup terjangkau, amenitas yang mendukung kenyamanan wisatawan, serta sistem tata kelola ansilari berbasis masyarakat melalui BUMDes yang melibatkan pembagian pendapatan secara adil antara desa, pemilik lahan, dan pengelola. Keempat komponen utama pembangunan pariwisata atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ansilari telah terintegrasi secara fungsional. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi yang memadukan pendekatan ekowisata dan pemberdayaan lokal dapat memperkuat keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), penelitian ini menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pengembangan kawasan wisata, dengan bobot global tertinggi sebesar 0,4601 (46,01%). Prioritas berikutnya adalah fasilitas berkelanjutan dengan bobot 0,3859 (38,59%), diikuti oleh peta lokasi sebesar 0,0851 (8,51%), dan terakhir dasar hukum/kebijakan dengan bobot 0,0689 (6,89%). Hasil ini menegaskan bahwa infrastruktur, terutama akses jalan, merupakan fondasi penting yang menentukan mobilitas, kenyamanan, dan pertumbuhan destinasi secara keseluruhan. Kondisi aksesibilitas yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam pengembangan Danau Paisupok. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur fisik harus menjadi prioritas dalam alokasi sumber daya, agar pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hasil ini memberikan pijakan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Saran

Peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, menyelaraskan antara hasil prioritas teknis yang diperoleh melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Infrastruktur yang memiliki bobot tertinggi dalam hasil analisis hendaknya menjadi fokus utama dalam perencanaan jangka pendek dan menengah. Selain itu, proses perencanaan pembangunan wisata Danau Paisupok perlu melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan pelaku wisata melalui forum diskusi seperti *Focus Group Discussion*. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan riil dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat.

Peneliti juga menyarankan agar seluruh bentuk pembangunan fisik di kawasan wisata mempertimbangkan daya dukung lingkungan (carrying capacity) guna menjaga kelestarian ekosistem dan kualitas pengalaman wisata. Metode AHP terbukti efektif dalam mengidentifikasi prioritas secara objektif, terstruktur, dan partisipatif, sehingga direkomendasikan untuk digunakan secara lebih luas dalam perencanaan pariwisata daerah lain. Selain aspek fisik, pengembangan kuliner lokal juga perlu diprioritaskan melalui dukungan pelatihan dan modal usaha bagi UMKM, serta pengadaan fasilitas seperti kios kuliner atau *food court* yang terintegrasi. Upaya ini dapat meningkatkan pengalaman wisata sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Lebih lanjut, peneliti menyarankan agar tarif sewa drone di kawasan Danau Paisupok diturunkan dan distandarisasi agar lebih terjangkau, serta dilengkapi dengan paket pemandu wisata sebagai bentuk promosi visual yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas dimensi kajian dengan memasukkan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih komprehensif. Pelibatan komunitas lokal dan wisatawan sebagai responden juga penting dilakukan untuk menggali preferensi dan kebutuhan dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil kajian dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafiz, M. W., & Firmansyah, D. P. (2019). Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Kawasan Objek Daya Tarik Wisata di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).
- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Ekonomi Bidang Pariwisata. Banggai Kepulauan: Badan Pusat Statistik.
- Bambang Supriadi, S. E., & Roedjinandari, N. (2017). Perencanaan dan pengembangan

destinasi pariwisata. Universitas Negeri Malang.

Bete, S.F., Alhadar, S. and Bakari, L. (2024). Pengelolaan Objek Wisata Danau Paisupok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD-Des) Di Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, 4, pp. 3732–3739.

Braga, S. S., Guzzi, A., & Malta, G. A. P. (2023). Analysis of The Tourist Territories of the Piaui Coast Using The Analytical Hierarchy Process. Mercator (Fortaleza), 22, e22007.

Butler, R. W. (1999). Sustainable Tourism: A State-of-the-Art Review. Tourism Geographies.

Cooper et al. (2008). An Introduction: Tourism and Principles, Fourth Edition Published. England: Pearson Education.

Cooper. (1995). Tourism Principles &Practice. London: Longman Group Limited.

Dianasari, D. A. M. L., Negarayana, I. B. P., Saputra, I. G. G., & Aridayanti, D. A. N. (2022). Measuring the priority of tourism village development in the new tourism era. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, 4(2), 147–154. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v4i2.6>

Duadji, N. (2021). Manajemen Pembangunan Suatu Kajian Manajemen Pembangunan Bidang Kepariwisataan.

Easterling, D. S., Miller, M. M., & Baum, L. (2016). Travel behavior and tourism infrastructure: A framework for destination competitiveness. Journal of Travel Research, 55(4), 475–488.

Febriani, P. D., & Suryawan, I. B. (2024). Persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Kota Denpasar, Bali. Jurnal Destinasi Pariwisata, 12(2), 383–388.

Ghamgosar, M., Haghayghi, M., Mehrdoust, F., & Arshad, N. (2011). Multicriteria decision making based on Analytical Hierarchy Process (AHP) in GIS for tourism. Middle-East Journal of Scientific Research, 10(4), 501-507.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Holden, A. (2016). Environment and tourism (3rd ed.). London: Routledge.

Iftikhar, T. H. (2021). Arahan Pengembangan Wisata Beras Basah Melalui Pendekatan Sustainable Tourism (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Kalimantan).

Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold

- Kuncoro, Mudrajat. 2006. "Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan-Keunggulan Kompetitif". Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, I., Irfan, M., Kumbayoni, N. G. P. I., Ferianto, F., & Badollahi, M. Z. (2024). Implementation of The Lake Paisu Pok Tourism Development Policy (Challenges and Recommendations for Enhancing Tourist Attraction. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, 250-264.
- Kurniawan, R., Kencana, E. N., & Gandhiadi, G. K. (2022). Tourism Development Priorities in Lombok Eastern with Analytical Hierarchy Process. JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 6(4), 821-833.
- Kurniawan, Z., Gani, A. J. A., & Makmur, M. (2017). Perencanaan Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara). Dia Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 37-47.
- Kusumawardhana, I. (2023). Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 4(1), 27-55.
- Lembaga Pengembangan Kompetensi Nasional. (2022). Perencanaan pembangunan partisipatif berbasis kebutuhan lokal. Jakarta: LPKN.
- Londomi, A. (2023, July 13). Tingkatkan Fasilitas Pendukung untuk Menarik Minat Wisatawan.
- Middleton, V. T. C., Fyall, A., Morgan, M., & Ranchhod, A. (2009). Marketing in travel and tourism (4th ed.). Routledge.
- Muhammad, M. H. (2013). Supply Chain Decision Making Using Analytical Hierarchy Process (AHP): A Pharmaceutical Industry Case Study (Doctoral dissertation, UMP).
- Munthafa, A. E., & Mubarok, H. (2017). Penerapan metode Analytical Hierarchy Process dalam sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa berprestasi. Jurnal Siliwangi Seri Sains dan Teknologi, 3(2).
- Nasrullah, N., Widodo, M. L., Yuniarti, E., Faried, A. I., Suryani, W., Hesty, R. S., ... & Pratiwi, I. I. (2023). Perencanaan Destinasi Pariwisata.
- Normalasari, N., Johannes, J., & Yacob, S. (2023). Minat kunjungan kembali wisatawan daya tarik wisata yang dimediasi oleh electronic word of mouth. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(01), 156-169.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Prayogo, D. A., & Haryanto, J. T. (2021). Infrastruktur pariwisata dan daya saing destinasi: Studi pada kawasan wisata alam. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 15(2), 101-113.
- Ramiro, A. G., Gonçalves, G. R., & Gómez, J. M. N. (2016). Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para la determinación de los indicadores del Turismo Rural. In X CITURDES: Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible (pp. 475-486).
- Saaty, T.L. 2008. "Decision Making With The Analytic Hierarchy Process". Int. J. Services Sciences. 1 (1), 83 – 98
- Sani, M. H., & Irhandayaningsih, A. (2019). Kemampuan Penelusuran Informasi Ditinjau dari Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 2 Batang. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 7(1), 131-140.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), 1(1), 23-35.
- Sihotang, C. dan Efawani. 2006. Penuntun Praktikum Limnologi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNRI. Pekanbaru
- Steven R. Covery. (2017). Pengertian Skala Prioritas Beserta Contoh dan Tabel. Oktober 08, 2017
- Sugiaman, A. G., & Tirani, N. (2021, November). The Identification of Infrastructure, Accessibility, Environment, and Physical Tourism Attraction Resources: Cibeureum Lake Case. In 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021) (pp. 650-655). Atlantis Press.
- Sugiyono. (2019). In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (p. 394). Bandung: Alfabeta
- Sastrayuda, Gumelar. (2010). Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Danau', pp. 1-8.
- Susanto, I. (2016). Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(3), 1-9.
- Syaifullah. (2010). Pengenalan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Tourism for Development Report.
- Utama, I. G. B. R., & Mahadewi, N. M. E. (2012). Metodologi Penelitian Pariwisata & Perhotelan. ANDI

- Utami, A. S. F. (2023). Analisa Pemakaian Alat Kesehatan Sekali Pakai Dengan Metode Ahp. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(1), 25-31.
- Verrico, T. J. (2020). Manajemen Proyek: Panduan Praktis. Penerbit: Lainnya
- Yanto, R. (2018). Penerapan metode Analytical Hierarchy Process dalam upaya peningkatan kualitas objek wisata. *Creative Information Technology Journal*, 4(3), 163-173.
- Yusfi, F. (2021). Efisiensi dan keberlanjutan dalam alokasi sumber daya fisik daerah. Jakarta: Penerbit Pembangunan Berkelanjutan.
- Yusri, N., Erfando, B. J., & Triana, E. (2019). Prioritas Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang (Studi Kasus: Pantai Bungus, Pantai Nirwana, Patai Pasir Jambak). *Jurnal rekayasa*, 9(1), 54-63.